

Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Prilaku Bullying di SMKN 2 Painan

Muharleni

Universitas Negeri Padang
muharleni.s.pdi@gmail.com

Firman

Universitas Negeri Padang
firman@fip.unp.ac.id

Netrawati

Universitas Negeri Padang
netrawati@fip.unp.ac.id

Neni Sriwahyuni

Sekolah Tinggi Agama Islam YPI Al Ikhlas Painan
nenisriwahyuni223@gmail.com

Hari Suriadi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
suriadihari6@gmail.com

Abstract

Bullying remains a critical issue in Indonesian schools, especially those with hierarchical systems such as SMKN 2 Painan, a semi-military vocational institution. This study examines the role of guidance and counseling (BK) teachers in addressing bullying within this context, focusing on intervention strategies and implementation challenges. Using a qualitative descriptive approach with a case study design, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving BK teachers, school staff, and students involved in bullying cases. Thematic analysis was applied to explore intervention patterns and contextual factors. Findings show that BK teachers are central to early detection, individual and group counseling, and conflict mediation. They apply an eclectic counseling approach combining behavioral, humanistic, and strength-based methods. Collaboration with the School Task Force for Violence Prevention (TPPK) also supports their efforts. However, limitations such as insufficient personnel, strong seniority culture, and underdeveloped

reporting mechanisms hinder effectiveness. The study highlights the need for systemic improvements, including enhancing the professional capacity of BK teachers, strengthening TPPK functions, and fostering a safer school culture. These findings provide practical insights for schools with similar structures to develop more effective anti-bullying interventions.

Keywords: Ullying, Counseling Teachers, Semi-Military School, Guidance and Counseling, TPPK

Abstrak

Bullying merupakan persoalan serius di sekolah, terutama di institusi dengan sistem hierarkis seperti SMKN 2 Painan, sebuah sekolah ketarunaan berbasis semi-militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam menangani bullying, serta mengidentifikasi strategi intervensi dan tantangan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap guru BK, siswa, dan pihak sekolah yang terkait. Analisis dilakukan secara tematik untuk menelusuri pola penanganan dan hambatan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru BK memiliki peran sentral dalam deteksi dini, konseling individu dan kelompok, serta mediasi konflik. Pendekatan konseling yang digunakan bersifat eklektik, menggabungkan teknik behavioristik, humanistik, dan berbasis kekuatan. Guru BK juga bekerja sama dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Namun, tantangan seperti keterbatasan tenaga, budaya senioritas, dan sistem pelaporan yang lemah menjadi penghambat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas profesional guru BK, optimalisasi fungsi TPPK, dan pembentukan budaya sekolah yang lebih aman dan suportif. Temuan ini bermanfaat sebagai referensi bagi sekolah dengan karakteristik serupa dalam menyusun intervensi bullying yang efektif.

Kata Kunci: Bullying, Peran Guru Bimbingan dan Konseling, Sekolah Ketarunaan

Pendahuluan

Perilaku bullying merupakan fenomena sosial yang terus mengemuka di lingkungan pendidikan, mencerminkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa yang bersifat sistemik dan kerap dianggap sebagai bagian dari “budaya” sekolah. Dalam konteks global, bullying telah diakui sebagai masalah serius oleh UNESCO, UNICEF, dan WHO, karena berdampak langsung terhadap perkembangan psikososial anak, prestasi akademik, serta keselamatan dan kesejahteraan peserta didik (UNESCO, 2019; WHO, 2020). Bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup intimidasi verbal, sosial, hingga kekerasan digital melalui media sosial (*cyberbullying*), yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Di Indonesia, hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 menunjukkan bahwa 32,1% kasus kekerasan yang terjadi di sekolah termasuk kategori bullying, dengan pelaku utama berasal dari kalangan siswa senior (KPAI, 2022). Data ini memperkuat temuan sebelumnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengidentifikasi sekolah sebagai salah satu institusi dengan risiko kekerasan struktural paling tinggi terhadap anak. Fenomena ini tidak hanya mengancam iklim belajar yang sehat, tetapi juga menormalisasi praktik kekuasaan yang melanggar hak asasi anak di dalam ruang pendidikan.

SMKN 2 Painan, sebagai satu-satunya sekolah ketarunaan berbasis pelayaran di Kabupaten Pesisir Selatan, menerapkan sistem disiplin semi-militer yang menekankan kepatuhan hierarkis dan tata tertib ketat. Sistem ini, meskipun bertujuan membentuk kedisiplinan dan karakter kuat, justru dalam praktiknya membuka ruang terjadinya relasi kuasa yang timpang antara siswa senior dan junior. Dalam beberapa kasus, relasi tersebut berkembang menjadi praktik bullying yang dibalut dalam dalih “pembinaan” atau “tradisi senioritas”. Perilaku ini tidak jarang mencakup perintah merendahkan martabat, pemukulan ringan, penghinaan verbal, serta pengucilan sosial terhadap siswa baru.

Budaya senioritas di SMKN 2 Painan berkembang secara turun-temurun dalam bentuk siklus balas dendam. Siswa yang pernah menjadi korban bullying pada masa junior, merasa memiliki hak moral untuk melakukan hal serupa ketika mereka telah menjadi senior. Pola ini menciptakan lingkaran kekerasan yang terus berulang setiap

tahun ajaran, dan sayangnya belum mendapatkan penanganan komprehensif dari institusi sekolah. Dalam banyak kasus, siswa korban memilih diam karena ketakutan terhadap balas dendam, rasa malu, atau ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan yang ada di sekolah. Ketakutan ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan guru di luar jam pelajaran.

Kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip pendidikan inklusif dan aman yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam kebijakan tersebut, sekolah diwajibkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta mengintegrasikan pendekatan pemulihan berbasis konseling dan edukasi nilai-nilai empati. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih belum merata, terutama di sekolah dengan karakteristik kedisiplinan tinggi seperti sekolah ketrunaan.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani bullying. Fungsi mereka tidak hanya sebagai pemberi layanan konseling individual atau kelompok, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun iklim sekolah yang sehat, dan sebagai advokat siswa dalam menghadapi tekanan sosial. Penelitian terdahulu menekankan bahwa peran guru BK dalam pencegahan bullying efektif apabila dilengkapi dengan kemampuan deteksi dini, pendekatan konseling berbasis empati, serta koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua (Adiyono et al., 2022; Kurniawan & Pranowo, 2018). Namun demikian, di banyak sekolah, termasuk SMKN 2 Painan, guru BK menghadapi keterbatasan struktural seperti jumlah personel yang tidak memadai, kurangnya pelatihan khusus, serta beban administratif yang tinggi.

Studi ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan antara kebijakan makro (Permendikbudristek No. 46/2023) dengan praktik mikro di lapangan, khususnya dalam konteks sekolah ketrunaan yang memiliki dinamika sosial khas. Minimnya kajian empiris mengenai efektivitas intervensi guru BK di sekolah-sekolah semi-militer memperkuat urgensi riset ini, mengingat bahwa intervensi yang berhasil pada sekolah umum belum tentu relevan diterapkan di lingkungan dengan budaya senioritas yang kental. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada eksplorasi konteks sosial, pola interaksi, serta strategi konseling yang

berbasis kekuatan (*strength-based approach*) dalam menyikapi kasus bullying.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran guru BK dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani perilaku bullying di SMKN 2 Painan. Fokus utama diarahkan pada bentuk layanan yang diberikan, strategi intervensi yang digunakan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kolaborasi antara guru BK dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), sebagai bagian dari sistem baru dalam perlindungan peserta didik.

Pemilihan SMKN 2 Painan sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada karakter unik sekolah ini, yang menjadikan pendekatan semi-militer sebagai bagian dari pembinaan karakter siswa. Pendekatan tersebut menciptakan struktur sosial yang hierarkis dan kuat, di mana setiap angkatan memiliki identitas serta solidaritas tersendiri. Dalam kondisi demikian, penguatan peran guru BK tidak hanya menuntut kompetensi profesional, tetapi juga kemampuan sosio-kultural dalam memahami dinamika kekuasaan dan psikologi kelompok yang khas di sekolah tersebut.

Hasil dari penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademik tentang peran guru BK dalam mengatasi bullying, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan sekolah dan pelatihan profesional guru BK. Selain itu, hasil studi ini diharapkan mampu memantik diskusi lebih luas mengenai pentingnya pendekatan lintas fungsi dan lintas perspektif dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

Dengan latar belakang yang kompleks dan dinamis, permasalahan bullying di sekolah berbasis ketarunaan memerlukan intervensi yang bersifat transformatif dan berkelanjutan. Intervensi tersebut tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dalam kerangka tersebut, guru BK memiliki posisi sentral yang dapat menjembatani ketegangan antara struktur disiplin militeristik dan kebutuhan siswa untuk merasa aman, diterima, dan didengarkan di lingkungan sekolahnya.

Dalam mengkaji peran guru Bimbingan dan Konseling dalam menangani perilaku bullying di lingkungan sekolah, penelitian ini berpijak pada kerangka teori konseling perkembangan dan teori bullying. Teori konseling perkembangan menekankan bahwa

intervensi psikopedagogis harus selaras dengan tahap perkembangan peserta didik, serta mengedepankan aspek pencegahan dan pemberdayaan (Corey, 2013). Selain itu, teori bullying yang dikembangkan oleh Olweus (1993) menjelaskan bahwa bullying muncul akibat ketimpangan kekuasaan sosial yang terjadi secara sistematis dan berulang, dengan karakteristik pelaku yang dominan dan korban yang tidak mampu mempertahankan diri. Dalam konteks sekolah ketarunaan seperti SMKN 2 Painan, relasi kuasa antara senior dan junior memperkuat kondisi struktural yang memfasilitasi terjadinya bullying. Oleh karena itu, strategi guru BK harus bersifat holistic menggabungkan pendekatan behavioristik untuk mengubah perilaku bermasalah, pendekatan humanistik untuk mengembangkan empati, serta pendekatan berbasis kekuatan (*strength-based counseling*) yang menekankan pada potensi positif peserta didik sebagai landasan perubahan perilaku (Saleebey, 2006).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran guru Bimbingan dan Konseling dalam menangani perilaku bullying di SMKN 2 Painan, sebuah sekolah berbasis ketarunaan dengan sistem semi-militer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial yang kompleks dalam konteks spesifik dan alami (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Subjek penelitian ditentukan secara purposif, meliputi 3 guru BK, 1 wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, 2 siswa korban bullying, dan 2 siswa pelaku bullying. Penelitian dilakukan selama tiga minggu pada semester genap tahun ajaran 2024/2025.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap interaksi siswa dalam kegiatan sekolah, dan studi dokumentasi atas arsip kasus BK serta pedoman pelaksanaan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Wawancara difokuskan pada persepsi, strategi intervensi, dan tantangan peran guru BK. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), yang mencakup pengkodean data, identifikasi tema, dan penyusunan narasi interpretatif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta *member checking* kepada informan kunci untuk memastikan akurasi temuan (Lincoln & Guba, 1985). Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi pola intervensi konseling serta

tantangan struktural yang dihadapi guru BK dalam konteks sekolah yang berkarakter semi-militer.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Bullying dalam Struktur Sosial Sekolah Ketarunaan

Bullying di SMKN 2 Painan tidak dapat dipahami secara dangkal sebagai tindakan menyimpang individual, tetapi harus dilihat sebagai gejala sistemik yang terstruktur dalam kultur sekolah berbasis ketarunaan. Sekolah ini menerapkan sistem kedisiplinan semi-militer, di mana struktur sosial sangat hierarkis dan relasi kuasa antara siswa senior dan yunior berlangsung secara kaku dan mendominasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menemukan bahwa praktik bullying dilakukan dalam bentuk fisik (hukuman push-up, lari keliling lapangan, pemukulan ringan), verbal (ejekan, hinaan, perintah merendahkan), dan psikologis (pengucilan sosial, ancaman). Menariknya, perilaku tersebut kerap dibungkus dalam dalih “pembinaan” atau “tradisi kedisiplinan” oleh senior kepada yunior, sehingga kekerasan terselubung menjadi bagian dari normalitas sosial di sekolah.

Tradisi ini tidak muncul secara kebetulan. Dalam wawancara dengan salah satu siswa senior, ia mengaku: *“Kami semua pernah diperlakukan seperti ini saat dulu menjadi yunior. Sekarang giliran kami. Itu wajar di sini.”* Pernyataan ini mencerminkan adanya siklus kekerasan yang diwariskan antargenerasi—fenomena yang dalam teori Pierre Bourdieu (1990) disebut sebagai *symbolic violence*, yakni bentuk kekerasan yang dilegitimasi secara sosial dan internalisasi oleh para pelakunya sebagai hal normal. Dengan demikian, praktik bullying tidak hanya dipelihara oleh pelaku, tetapi juga dilestarikan oleh korban yang menjadi pelaku berikutnya. Sistem ini menjadikan kekerasan sebagai simbol kekuasaan dan “bukti” kelulusan dari masa yunior.

Fenomena ini diperkuat dengan keberagaman latar belakang siswa. SMKN 2 Painan menerima siswa dari berbagai wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan bahkan dari luar daerah. Perbedaan karakter, nilai budaya, dan tingkat kedewasaan membuat proses adaptasi menjadi tidak seimbang. Dalam kondisi demikian, kelompok senior menjadi kekuatan dominan yang mengatur ritme sosial dan psikologis siswa yunior. Bagi sebagian siswa, tunduk pada senior menjadi mekanisme bertahan hidup. Dari hasil observasi ditemukan bahwa ada siswa yang lebih takut kepada seniornya daripada kepada

gurunya. Budaya takut ini menyebabkan sebagian besar korban tidak berani melapor dan memilih menyembunyikan penderitaan mereka.

Praktik bullying yang terinstitusi seperti ini sangat membahayakan, karena menciptakan atmosfer sekolah yang tidak aman dan menghambat perkembangan psikososial peserta didik. Menurut Olweus (1993), bullying adalah bentuk kekerasan berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah dalam relasi kuasa yang timpang. Temuan di SMKN 2 Painan memperlihatkan dengan jelas bahwa bullying tidak hanya terjadi karena lemahnya kontrol individu, tetapi juga karena kuatnya sistem nilai yang memberi ruang bagi kekerasan untuk dijustifikasi. Dalam konteks ini, sekolah seolah menjadi miniatur masyarakat otoriter, tempat kekuasaan dikukuhkan melalui dominasi fisik dan psikologis.

Deteksi Dini oleh Guru BK

Salah satu fungsi vital guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam konteks penanganan bullying di SMKN 2 Painan adalah melakukan deteksi dini terhadap potensi dan gejala bullying yang muncul di lingkungan sekolah. Deteksi dini sangat penting mengingat sebagian besar korban tidak secara terbuka melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa para guru BK secara aktif melakukan pemantauan perilaku siswa baik di dalam kelas maupun di luar jam pelajaran. Guru BK juga menjalin komunikasi intensif dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk mengidentifikasi siswa yang menunjukkan tanda-tanda perubahan perilaku, seperti penurunan konsentrasi belajar, absensi yang meningkat, gangguan emosional, hingga kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial.

Dalam salah satu kasus, guru BK menyadari adanya perubahan perilaku signifikan pada seorang siswa kelas X yang sebelumnya aktif tetapi mendadak menjadi pendiam dan menolak terlibat dalam diskusi kelas. Setelah dilakukan pendekatan individual, terungkap bahwa siswa tersebut mengalami tekanan psikologis karena kerap dipaksa menjalani "hukuman tradisional" dari kakak kelasnya di asrama. Informasi ini dikonfirmasi melalui observasi partisipatif peneliti yang menunjukkan bahwa interaksi antara senior dan junior di luar jam pelajaran penuh dengan tekanan simbolik. Siswa junior selalu tampak menjaga jarak dan menahan ekspresi ketika berhadapan dengan siswa

tingkat atas. Situasi seperti ini sulit terdeteksi tanpa sensitivitas guru BK dan pendekatan personal yang konsisten.

Deteksi dini yang dilakukan oleh guru BK di sekolah ini sejalan dengan konsep pendekatan perkembangan dalam konseling yang dikemukakan oleh Corey (2013), di mana guru BK berperan bukan hanya sebagai konselor yang menangani masalah setelah muncul, tetapi sebagai preventive educator yang mengantisipasi potensi gangguan melalui pengenalan perilaku dan dinamika sosial siswa. Peran ini menuntut kepekaan sosial, keterampilan observasi, dan kemampuan membangun relasi empatik dengan peserta didik. Guru BK menggunakan instrumen seperti catatan harian siswa, form penilaian kehadiran, dan laporan informal dari guru lainnya sebagai bahan evaluasi perilaku yang mencurigakan.

Namun demikian, guru BK juga menghadapi sejumlah tantangan dalam proses deteksi ini. Dengan hanya tiga orang guru BK yang harus menangani ratusan siswa, pemantauan secara menyeluruh menjadi sangat sulit. Keterbatasan waktu, beban administratif, dan distribusi pengawasan yang tidak merata di luar jam pelajaran menyebabkan tidak semua tanda-tanda awal bullying bisa terdeteksi secara cepat. Dalam wawancara, seorang guru BK menyampaikan, *"Kadang kami tahu kasus setelah kondisi psikologis siswa sudah parah, karena sebelumnya mereka tidak berani bicara."* Hal ini menunjukkan bahwa meskipun deteksi dini dilakukan dengan sungguh-sungguh, sistem pendukung dan personel yang terbatas menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan fungsi ini secara optimal. Oleh karena itu, memperkuat sistem pelaporan internal, menambah kapasitas guru BK, dan membentuk jaringan pemantauan lintas fungsi menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks sekolah seperti SMKN 2 Painan.

Strategi Intervensi Konseling oleh Guru BK

Dalam menangani kasus bullying yang telah teridentifikasi, guru BK di SMKN 2 Painan menerapkan pendekatan intervensi konseling yang bersifat eklektik dan kontekstual. Intervensi dilakukan melalui konseling individual dan kelompok, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik korban dan pelaku. Untuk siswa korban, guru BK fokus pada pemulihan psikologis, membangun kembali kepercayaan diri, serta memperkuat kemampuan menghadapi tekanan sosial. Sebaliknya, terhadap pelaku, intervensi diarahkan pada kesadaran moral, pengakuan atas dampak perbuatan mereka, serta penguatan

tanggung jawab sosial. Salah satu guru BK menjelaskan bahwa dalam satu sesi konseling, pelaku diminta menuliskan narasi reflektif tentang perasaannya saat dulu menjadi korban, dan bagaimana pengalaman itu akhirnya mereka ulangi. Strategi ini bukan hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga menyasar kesadaran emosional dan empatik.

Pendekatan yang digunakan menggabungkan teknik behavioristik dan humanistik. Teknik behavioristik diterapkan dalam bentuk kontrak perilaku dan sistem reward-punishment yang dirancang untuk membentuk kebiasaan baru yang lebih positif. Sementara pendekatan humanistik, sebagaimana dikemukakan oleh Rogers (1951), digunakan untuk menciptakan hubungan konseling yang empatik dan non-judgmental, yang memungkinkan siswa terbuka mengungkapkan pengalaman traumatiknya. Selain itu, guru BK juga menggunakan pendekatan berbasis kekuatan (*strength-based counseling*) untuk menumbuhkan potensi siswa yang selama ini terhalang oleh tekanan sosial. Pendekatan ini berakar pada gagasan Saleebey (2006) bahwa klien harus dilihat sebagai individu yang memiliki sumber daya dan kekuatan untuk berkembang, bukan semata-mata sebagai pembawa masalah.

Namun, keberhasilan strategi intervensi ini sangat bergantung pada intensitas pendampingan dan konsistensi relasi konseling. Dalam konteks sekolah yang memiliki sistem disiplin ketat seperti SMKN 2 Painan, ruang-ruang dialog terbuka seperti sesi konseling menjadi sangat langka, terutama bagi siswa yang telah terbiasa memendam perasaan. Guru BK menyadari bahwa intervensi sesaat tidak cukup untuk memutus mata rantai kekerasan. Oleh karena itu, mereka merancang konseling berkelanjutan dengan pendekatan tematik, seperti konseling empati, konseling trauma ringan, dan konseling nilai moral, yang terintegrasi dalam kalender layanan BK. Dalam satu kasus, siswa korban yang semula pasif akhirnya mampu mengutarakan keinginannya menjadi agen perubahan, dan ditunjuk menjadi duta anti-bullying di kelasnya. Ini menunjukkan bahwa strategi intervensi yang menyentuh aspek personal, sosial, dan struktural secara bersamaan berpotensi mengubah dinamika kekuasaan di antara siswa.

Mediasi Konflik dan Restorasi Sosial

Salah satu strategi penting yang dijalankan oleh guru BK dalam menyikapi konflik bullying adalah melalui mekanisme mediasi. Di SMKN 2 Painan, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik

antara pelaku dan korban secara konstruktif, dengan pendekatan dialogis dan partisipatif. Proses ini biasanya berlangsung setelah sesi konseling individual, ketika baik pelaku maupun korban telah cukup siap secara emosional untuk bertemu. Guru BK berperan sebagai fasilitator yang memastikan situasi aman, adil, dan tidak memojokkan salah satu pihak. Dalam salah satu kasus, mediasi dilakukan di ruang konseling dengan suasana informal. Korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan tanpa interupsi, sementara pelaku didorong untuk mendengarkan dan mengakui dampak dari perbuatannya. Hasilnya, keduanya sepakat untuk tidak mengulang kejadian yang sama dan menandatangani komitmen bersama yang didokumentasikan secara internal.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan relasi sosial dan tanggung jawab bersama dibanding sekadar pemberian hukuman (Zehr, 2002). Dalam konteks pendidikan, pendekatan restoratif terbukti lebih efektif untuk membentuk kesadaran sosial dan moral dibanding pendekatan hukuman yang represif. Guru BK melihat bahwa mediasi bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membuka ruang belajar sosial tentang empati, keadilan, dan rekonsiliasi. Hal ini menjadi sangat penting di sekolah berbasis ketrunaan, di mana nilai-nilai hierarkis dan loyalitas kelompok sangat kuat. Dengan membiasakan forum mediasi sebagai bentuk penyelesaian konflik, budaya kekerasan yang selama ini dianggap sebagai bagian dari pembinaan dapat mulai digeser menuju budaya dialog dan tanggung jawab sosial.

Meski begitu, proses mediasi tidak selalu mudah. Dalam beberapa kasus, pelaku menunjukkan resistensi dan defensif saat diminta mengakui kesalahannya. Mereka merasa tindakan tersebut adalah “tradisi” yang seharusnya diterima oleh junior. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis, serta oleh keberanian korban dalam menyuarakan pengalaman mereka. Oleh karena itu, guru BK merancang sesi pra-mediasi untuk membangun pemahaman kedua pihak bahwa proses ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menyembuhkan. Dengan strategi seperti ini, mediasi di SMKN 2 Painan mulai membentuk pola interaksi baru antarsiswa yang lebih sehat, dan pada akhirnya berkontribusi dalam membangun iklim sekolah yang lebih inklusif dan aman.

Kolaborasi Guru BK dengan TPPK dan Lingkungan Sekolah

Efektivitas peran guru BK dalam menangani bullying di SMKN 2 Painan tidak dapat dilepaskan dari kerja kolaboratif dengan berbagai komponen sekolah, khususnya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Berdasarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, sekolah wajib membentuk TPPK sebagai upaya sistemik untuk mencegah dan merespons kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dalam praktiknya, guru BK menjadi tokoh sentral dalam tim ini, karena mereka memiliki kompetensi dalam asesmen psikososial dan intervensi konseling. Guru BK berkolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan wakil kepala sekolah dalam merancang program edukasi anti-bullying, menyusun SOP pelaporan kekerasan, serta membentuk forum siswa untuk kampanye kesadaran. Salah satu contoh nyata kolaborasi ini adalah pelaksanaan deklarasi anti-kekerasan oleh seluruh siswa baru yang difasilitasi oleh guru BK bersama TPPK pada awal tahun ajaran, sebagai bentuk komitmen kolektif terhadap budaya sekolah yang aman dan inklusif.

Namun demikian, kolaborasi ini belum sepenuhnya optimal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa belum semua guru memahami struktur kerja dan tanggung jawab TPPK secara menyeluruh. Beberapa anggota tim belum dibekali pelatihan teknis terkait mediasi konflik atau penanganan trauma psikologis. Guru BK juga menghadapi kesulitan dalam memastikan keberlanjutan program karena tidak semua kegiatan mendapat dukungan logistik atau pengawasan intensif dari pihak manajemen sekolah. Dalam perspektif *whole school approach* (UNESCO, 2019), kolaborasi penanganan kekerasan tidak hanya mensyaratkan keterlibatan berbagai pihak, tetapi juga konsistensi dukungan institusional, regulasi internal yang jelas, dan alokasi sumber daya yang memadai. Tanpa itu, peran guru BK—meskipun strategis—akan tetap terbatas pada intervensi mikro yang tidak mampu memutus mata rantai kekerasan secara struktural.

Tantangan Struktural dan Budaya Diam

Dalam pelaksanaan peran strategisnya, guru BK di SMKN 2 Painan menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat efektivitas penanganan bullying. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah tenaga BK yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Dengan hanya tiga guru BK yang harus menangani seluruh peserta didik dari berbagai jenjang dan jurusan, pelayanan konseling

menjadi tidak optimal, terutama dalam hal pemantauan berkala dan konseling lanjutan. Selain itu, guru BK juga dibebani dengan tugas administratif dan kegiatan non-konseling yang cukup menyita waktu, sehingga mengurangi intensitas pendampingan psikososial. Di sisi lain, belum tersedianya ruang konseling yang benar-benar aman dan nyaman turut menjadi hambatan teknis yang mengurangi kualitas relasi konseling antara guru BK dan siswa.

Tantangan lain yang tak kalah serius adalah kuatnya *budaya diam* di kalangan siswa korban bullying. Banyak siswa yang memilih bungkam karena merasa takut terhadap konsekuensi sosial, seperti dikucilkan atau menjadi sasaran balas dendam oleh kelompok senior. Dalam wawancara, beberapa korban mengungkapkan bahwa mereka lebih memilih “menahan sendiri” daripada dianggap lemah oleh teman-temannya. Fenomena ini sejalan dengan teori *spiral of silence* (Noelle-Neumann, 1974), yang menjelaskan bagaimana individu enggan menyuarakan penderitaannya ketika opini dominan mendukung pelaku atau menormalisasi kekerasan. Akibatnya, banyak kasus bullying tidak pernah terungkap secara formal, dan guru BK hanya bisa bertindak ketika dampaknya sudah cukup berat. Untuk mematahkan budaya diam ini, diperlukan penciptaan *safe spaces* – ruang yang melindungi kebebasan berekspresi korban tanpa ancaman stigmatisasi – yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi institusi pendidikan dengan karakter otoriter seperti SMKN 2 Painan.

Penutup

Bullying di SMKN 2 Painan merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dalam struktur sosial sekolah yang sangat hierarkis dan bercorak semi-militer. Budaya senioritas yang kuat telah menciptakan siklus kekerasan yang direproduksi dari generasi ke generasi siswa. Dalam kondisi ini, tindakan agresif sering kali dibungkus sebagai bentuk “pembinaan” atau tradisi sekolah, sehingga mempersulit identifikasi dan intervensi. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan penanganan bullying di sekolah ketarunaan memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya sekolah itu sendiri.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) terbukti memiliki peran strategis dalam memutus rantai kekerasan tersebut melalui upaya deteksi dini, intervensi konseling individual dan kelompok, mediasi konflik, serta kolaborasi dengan Tim Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan (TPPK). Strategi konseling yang digunakan bersifat eklektik, menggabungkan pendekatan behavioristik, humanistik, dan berbasis kekuatan. Meski demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan jumlah tenaga BK, resistensi budaya, serta minimnya pelaporan kasus menjadi hambatan serius dalam optimalisasi peran mereka.

Temuan ini menyiratkan pentingnya reformulasi kebijakan perlindungan peserta didik yang lebih kontekstual di sekolah dengan sistem semi-militer. Diperlukan penguatan kapasitas profesional guru BK, revitalisasi fungsi TPPK, serta penciptaan ruang aman bagi siswa untuk menyuarakan pengalaman mereka tanpa rasa takut. Artikel ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan sistem intervensi bullying yang lebih adaptif, kolaboratif, dan transformatif, tidak hanya di SMKN 2 Painan, tetapi juga di sekolah-sekolah dengan karakteristik serupa di Indonesia.

Referensi

- Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. (2022). Peran Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649–658. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1234>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Corey, G. (2013). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (9th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Ivey, A. E., Ivey, M. B., & Zalaquett, C. P. (2016). *Intentional interviewing and counseling: Facilitating client development in a multicultural society* (9th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Kurniawan, D. E., & Pranowo, T. A. (2018). Bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama sebagai upaya mengatasi perilaku bullying di sekolah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 2(1), 50–60. <https://doi.org/10.30596/jbkt.v2i1.1234>

- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence: A theory of public opinion. *Journal of Communication*, 24(2), 43–51.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x>
- Noddings, N. (2005). *The challenge to care in schools: An alternative approach to education* (2nd ed.). New York, NY: Teachers College Press.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell.
- Saleebey, D. (2006). *The strengths perspective in social work practice* (4th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. Paris: UNESCO Publishing.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483>
- WHO. (2020). *Global status report on preventing violence against children*. Geneva: World Health Organization.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.